

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adjie, Habib, 2014, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung.

_____, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.

_____, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung.

Anshori, Abdul Ghofur, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.

Duha, Timotius, 2018, *Perilaku Organisasi*, Deepublish, Yogyakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

HR, Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.

HS, Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kie, Tan Thong, 2000, *Buku I Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Notodisoerjo, R. Soegondo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan, Cetakan Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

Salim, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Siagian, Sondang P, 2003, *Filsafat Adminsistrasi, Edisi Revisi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Statistik, Badan Pusat, 2018, *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2018*, BPS Provinsi DIY, Yogyakarta.
- Sujamto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulihandari, Hastanti dan Nisya Rifani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sutrisno, Edy, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana, Jakarta.
- Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Biagraf Publishing, Yogyakarta.
- Tobing, G.H.S Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Wibowo, 2012, *Manajemen Kinerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. JURNAL/ARTIKEL/TESIS-DISERTASI

- Margareth, Rona Ayu Edithya, “Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.
- Paramita, Yuana Rizka, “Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Mengawasi Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Notaris Di Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Purwaningsih, Endang, “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya”, *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

D. INTERNET

Indonesia, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Republik, “Jumlah Provinsi, Kab, dan Kota”, <https://otda.kemendagri.go.id/seputar-otda/jumlah-provinsi-kab-dan-kota/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2019.

Yogyakarta, Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah Daerah Istimewa, “Laju Pertumbuhan Ekonomi”, http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/datadasar/index/413-laju-pertumbuhan-ekonomi?id_skpd=29, diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik, “KBBI Daring Kinerja”,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kinerja>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019.

E. HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara pra penelitian dengan Bapak Dr. Khotibul Umam, S.H., LL.M, Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Gunungkidul, selaku responden, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019.

Hasil wawancara pra penelitian dengan Bapak Rasyid Kurniawan, sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Gunungkidul, selaku responden, pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019.

Hasil wawancara penelitian dengan Bapak Rasyid Kurniawan, Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Gunungkidul, selaku responden, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2020.

Hasil wawancara penelitian dengan Ibu Hj. Susilowati Achmad, S.H., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Gunungkidul, selaku responden, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Gunungkidul, selaku responden, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Anugrah Anditya, S.H., M.T., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Gunungkidul, selaku responden, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Sutanto, S.H. M.S., Akademisi Universitas Gadjah Mada, selaku narasumber, tanggal 15 Juni 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi Darussalam, S.H. M.Hum., Notaris Kab. Sleman dan Akademisi Universitas Gadjah Mada, selaku narasumber, tanggal 19 Mei 2020.